

BAB V

PENUTUP

Kebijakan ketersediaan pangan menjadi prioritas utama bidang ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru karena ketersediaan pangan sejak masa penjajahan hingga masa sekarang sangat erat kaitannya dengan stabilitas negara. Apabila suatu negara mengalami krisis pangan maka negara tersebut akan bergejolak. Hal ini pernah terjadi di Indonesia pada masa penjajahan Kolonial Belanda. Kemudian hal ini kembali terjadi pada masa Indonesia baru merdeka. Pada saat itu situasi sosial, politik, dan ekonomi masih sangat kacau. Akibat situasi keamanan yang tidak mendukung, segala upaya perbaikan ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar. Dampak terburuk dari semua kejadian tersebut adalah banyak penduduk Indonesia yang menderita bahaya kelaparan. Penduduk merasa kesulitan karena harga kebutuhan pangan yang melambung tinggi sebagai dampak dari inflasi.

Soeharto banyak belajar dari kegagalan pada masa pemerintahan sebelumnya. Ia menyadari betul bahwa persoalan pangan bukanlah sesuatu yang dapat disampingkan. Bahkan ia menyatakan bahwa pangan merupakan pertahanannya yang terakhir. Ia menjadikan pangan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Oleh karena itu, ia berusaha menjadikan ketersediaan pangan sebagai sebuah prioritas utama dalam bidang ekonomi selama masa pemerintahannya. Karena Soeharto juga mengerti bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berjalan lancar apabila stabilitas negara terganggu, dan stabilitas negara tidak akan pernah terwujud apabila masyarakat dalam negara tersebut masih menderita kelaparan.

Selama menjalankan kebijakannya, sektor pertama yang mendapat perhatian khusus adalah sektor pertanian padi. Soeharto melakukan perbaikan dari kebijakan di sektor pertanian padi ini. Namun, ia juga mengambil ide baik dari kesuksesan pada masa pemerintahan sebelumnya, seperti program intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian.

Pemeran utama dalam sektor pertanian adalah petani. Soeharto juga memiliki cara jitu merangsang para petani agar mau mendukung kebijakannya

dengan memproduksi padi semaksimal mungkin. Ia memberikan janji bahwa jika para petani menggabungkan diri mereka ke dalam program-program pemerintah maka kesejahteraan mereka akan meningkat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, nasib para petani tersebut tetap terpuruk. Hal ini disebabkan oleh kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang dibuat sejak awal. Panen padi yang melimpah tidak membuat petani menjadi kaya. Ironinya, pemerintah justru menekan harga jual padi tersebut serendah mungkin sehingga para petani harus menanggung kerugian akibat dari biaya produksi yang terlalu tinggi. Pemerintah seolah-olah menutup mata terhadap semua penderitaan yang dirasakan oleh petani. Orde Baru tidak secara empiris dan realistis mendukung para petani dengan investasi modal berupa tanah garapan. Kekurangan tanah garapan merupakan masalah yang selalu ada dan tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sehingga para petani tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari produksinya. Rendahnya angka kepemilikan tanah para petani menjadi faktor penyebab petani terus menjadi miskin. Kebijakan pangan pemerintah Orde Baru yang serba berantakan tersebut membuat mayoritas nasib petani Indonesia tidak kunjung membaik seiring dengan perubahan waktu.

Di satu sisi kebijakan pangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa dampak positif, yaitu Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. Namun di lain sisi, kebijakan pangan tersebut justru hanya difokuskan kepada kepentingan konsumen, yaitu mereka yang mayoritas tinggal di kota. Kebijakan pangan pada masa pemerintahan Orde Baru ini hanya difokuskan untuk mewujudkan stabilitas negara yang aman, sehingga hal ini telah mengabaikan nasib para petani produsen beras yang kebanyakan dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan.

Hal yang paling disayangkan adalah prestasi gemilang tentang swasembada pangan tersebut hanya bersifat sementara dan menimbulkan dampak negatif. Pemerintah tidak mampu mempertahankan kebijakan tersebut dalam jangka waktu panjang. Ini terbukti bahwa sejak 1988, Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras, dan hal itu terjadi hingga saat ini. Keadaan ini terjadi karena pemerintah Orde Baru tidak konsisten dalam menjalankan kebijakannya. Dalam hal pelaksanaan kebijakan pangan, Orde Baru telah mengabaikan faktor

budaya masyarakat Indonesia yang sebelumnya tidak hanya mengkonsumsi beras sebagai makanan utama. Hal ini menyebabkan produksi pangan lainnya seperti jagung, sagu, singkong, dan lainnya mengalami penurunan. Keadaan seperti ini memperburuk keadaan saat Indonesia kembali menjadi negara pengimpor bahan pangan. Pemerintah hanya semangat menjalankan kebijakannya pada masa-masa awal pemerintahannya saja, dan begitu kesuksesan telah mereka capai mereka begitu cepat merasa puas. Dan ternyata hal ini berakibat fatal terhadap perkembangan sektor pertanian. Sektor pertanian yang telah menopang pembangunan ekonomi Indonesia begitu mudah dilupakan untuk selanjutnya posisinya digantikan oleh sektor industri hingga sekarang.

